

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam setiap penelitian atau karya tulis, pendahuluan memegang peranan penting sebagai landasan pemahaman terhadap topik yang dibahas. Bagian ini tidak hanya memperkenalkan latar belakang masalah, tetapi juga menjelaskan tujuan serta ruang lingkup pembahasan. Dengan demikian, dapat memperoleh gambaran awal mengenai isi dan relevansi topik yang diangkat. Berikut ini akan dijabarkan pendahuluan yang menguraikan aspek-aspek tersebut secara lebih rinci. Bagian ini menjadi fondasi yang membantu memahami keseluruhan isi penelitian secara lebih sistematis dan terstruktur.¹

A. Latar Belakang Masalah

Pada lingkungan sosial ada prinsip-prinsip dan etika hidup dalam bermasyarakat dan bernegara yang harus dipegang teguh karena merupakan bentuk aspek kehidupan bagi umat Islam yang harus dijalani, karena ini sebagai salah satu tanda bukti bahwa di dalam ajaran agama Islam selain beribadah tetapi diatur pula sistem untuk bermasyarakat dan bernegara. Hubungan manusia dengan agama sangat lekat dalam sosial kemasyarakatan, ketika manusia berada di manapun agama itu termasuk ke dalam kebutuhan asasi.²

Latar belakang penelitian etika politik melibatkan pemahaman akan dilema moral yang dihadapi oleh pemimpin politik saat mengambil keputusan yang kompleks. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pemimpin politik sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan penetapan garis batas yang jelas antara kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan kepentingan masyarakat. Etika politik dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat sosial lebih baik dari apa yang akan dihadapinya atau yang dikatakan oleh Peter Merkl: “politik dalam sebaik-baiknya adalah bentuk suatu usaha untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan adil agar masyarakat merasakan kesejahteraan dalam hidupnya.”³

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2023), hal. 204

² Kaelany HD, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksa, 1992), hal. 18

³ Budiarto Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, I (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 15

Hubungan antara otoritas agama dan otoritas politik itu merupakan salah satu hal yang memang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap masyarakat itu mempunyai sisi kerohanian terhadap agamanya maka dari itulah pemerintah harus mampu mengambil posisi yang baik agar hubungan antara agama dan politik mampu untuk menciptakan keseimbangan hukum tidak boleh otoritas politik mendominasi otoritas agama sebagaimana yang dipraktikkan oleh nabi Muhammad SAW, yang mampu menegakkan keseimbangan antara keduanya.⁴

Politik memiliki salah satu fungsi untuk sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya menjadi prosedur dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat, menurut John Stuart Mills dalam bukunya ia mengungkapkan bahwa tujuan utama dari politik ialah mendorong dari setiap masyarakat untuk selalu bertanggung jawab dan juga mampu menjadikan masyarakat dewasa.⁵

Dalam kehidupannya, dimensi politik yang dimiliki manusia akan tersalurkan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari lingkungan masyarakat. Politik bukan sekadar aktivitas individu, tetapi merupakan bagian dari kehidupan kolektif yang melibatkan interaksi, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama. Politik hadir dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala kecil seperti keluarga dan komunitas, pepatah Indonesia mengatakan *gemah ripah loh jinawi*⁶, Aristoteles dan Plato menyebutnya sebagai *en dam onia* atau *the good life* pada bangsa Yunani kuno.⁷

Etika politik memiliki peran penting dalam memberikan panduan moral kepada pemimpin politik agar dapat mengatasi dilema-dilema yang dihadapi. Dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip etika politik, pemimpin politik dapat memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada integritas dan keadilan. Dalam implementasinya, etika bukan hanya suatu keharusan yang diterapkan pada perilaku politik saja, etika harus diimplementasikan pada berbagai macam kegiatan

⁴ Sidi Ritaudain, *Khazanah Propetika Politik* (Lampung: Harakindo Publishing, 2013), hal. 60

⁵ Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, VI (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 44-45

⁶ Merupakan semboyan dari bahasa Jawa yang artinya tentram dan makmur serta subur tanahnya yang sangat subur. Ita Masruro, Luluk Sri Prasetyoningsih, and Dkk, *Menggagas Pembelajaran Sastra Indonesia Pada Era Kelimpahan*, ed. Ari Ambarwati and Rusdianti Wuryaningrum (Malang: Unisma Press, 2021), hal. 194

⁷ Miriam, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, hal. 14

manusia dalam lingkungan sosial yang tidak lepas dari perilaku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai etika.⁸

Dari proses sosialisasi politik seluruh masyarakat dapat memahami, mengenal dan merasakan nilai-nilai politik tertentu dilingkungan, oleh sebab itu pasti akan dapat terpengaruhi sikap dan tindakannya dalam tingkah laku politik mereka tanpa disadari. Nilai-nilai politik yang sudah terbentuk di dalam diri seseorang biasanya akan memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat tersebut, seperti pada nilai-nilai sosial-budaya dan agama dalam masyarakat.⁹

Seharusnya ini dijadikan bahan evaluasi serta motivasi untuk para pengkaji kitab suci Al-Qur'an dengan tujuan umat Islam dapat senantiasa meningkatkan karya tafsir dengan perspektif politik. Namun, politik pula bukan hanya sekedar berpolitik melainkan juga harus diterapkan pula etika politiknya di tengah banyaknya konflik politik yang terjadi di masyarakat, berikut adalah beberapa etika politik kenegaraan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ialah, amanah, ketaatan, keadilan, musyawarah dan persamaan.¹⁰

Hubungan ilmu politik dengan etika adalah suatu hubungan yang mampu membatasi ilmu politik, terutama pada praktik politik secara langsung. Karena etika mengatakan apa yang dapat dilakukan oleh seorang politisi, tetapi di samping itu menetapkan batas-batas dari apa yang wajib dibiarkan. Karena etika memberikan dasar moral kepada politik, jika seorang politisi menghilangkan etika pada praktik politiknya maka akan didapati politik yang bersifat "*machiavellistis*"¹¹ yakni politik hanya dijadikan sebagai alat melakukan segala sesuatu baik atau buruk tanpa memperhatikan kesusilaan.¹²

⁸ Achmad Farid, "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam," *Dauliyah* 4 (2019): 32, hal. 30

⁹ Alfian, *PEMIKIRAN DAN PERUBAHAN POLITIK INDONESIA* (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 233

¹⁰ Katimin, *Politik Islam: Study Tentang Azas, Pemikiran Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 2

¹¹ Machiavelisme adalah politik yang menumbalkan moralitas publik dan mencoreng etika politik yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan ajaran Islam menurut: Rahmat Hidayat and Suwanto Suwanto, "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia," *Jurnal: JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (2020): 124, hal. 124

¹² F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Binacipta, 2016), hal. 88

Al-Qur'an mengandung berbagai jawaban persoalan hidup, tentu saja merupakan sumber etika Islam, meskipun di dalamnya bukan hanya tentang etika saja, kerangka moral dipresentasikan sebagai sesuatu yang mampu di aplikasikan untuk semua orang, pada zaman Nabi Muhammad serta semua komunitas muslim sesudahnya sangat memegang teguh Al-Qur'an karena Al-Qur'an menjadi dasar etika dalam hukum Islam.¹³

Tafsir Al-Qur'an adalah karya manusia yang membahas tentang petunjuk dan maksud Allah tentang berbagai hal di kehidupan manusia. Tafsir telah ada sejak periode nabi Muhammad orang pertama yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan Al-Qur'an. Tafsir terus berkembang setelah wafatnya nabi dengan banyak perkembangan yang dilakukan oleh para sahabat, ahli kitab dan cendekiawan Islam yang dipengaruhi oleh keadaan masyarakat karena tafsir sendiri yang perlu menjawab perkembangan zaman.¹⁴

Perkembangan tafsir mencapai wilayah Nusantara hingga muncul istilah tafsir Nusantara yang dibuat oleh ulama Nusantara dengan menggunakan Bahasa lokal dan Bahasa nasional. Memiliki karakteristik lokal Nusantara istilah tafsir Nusantara merupakan karya tafsir yang mengadopsi tradisi lokal Nusantara dengan mengedepankan kearifan lokal tafsir Nusantara harus ditulis oleh penulis yang berdiam di Nusantara.¹⁵

Perkembangan tafsir di Nusantara memiliki beragam corak karena pengaruh budaya, sosial dan latar belakang mufasir yang memiliki beragam perbedaan. Hal ini terjadi karena perbedaan keadaan masyarakat yang bermula tradisional menjadi modern dengan latar belakang pendidikan pesantren ataupun sekolah umum memberi pengaruh terhadap penafsiran seorang mufasir dalam memahami dan

¹³ Jhon Kelsay, Farhad Kazemi, and Dkk, *Etika Politik Islam*, ed. Sohail H. Hashmi (Jakarta: ICIP, 2005), hal. 206

¹⁴ Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*, IV (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2014), hal. 106

¹⁵ Rosihon Anwar and Asep Abdul Muhyi, "Transmisi Dan Transformasi Tradisi Tafsir Dari Mesir Ke-Nusantara: Kajian Tafsir Qur'an Karim," *Jurnal: Tashwirul Afkar* 41, no. 2 (2022): 213–40, hal. 218

menjelaskan isi kandungan ayat Al-Qur'an. Tafsir Nusantara bermula pada abad 16 Masehi dan eksistensinya semakin berkembang hingga saat ini.¹⁶

Tafsir *Minnatur Rahman* karya Abu Marwan Hadidi bin Musa membahas pokok-pokok keagamaan seperti fiqh, akidah, ibadah, tauhid dan sebagainya. Pada penelitian ini memiliki titik fokus kepada pembahasan fiqh khususnya *fiqh siyasah* yang mencangkup kajian tentang *siyasah dusturiyah*. Akan sangat menarik untuk mengetahui bagaimana seorang aktivis dakwah bermanhaj salaf memberikan pandangan terhadap etika politik di era modern saat ini dan sangat menarik sebagai khazanah pengetahuan untuk dibahas oleh para akademisi dalam tafsir *Minnatur Rahman* karya Abu Yahya Marwan bin Musa. Karena tidak dapat dipungkiri pada penafsirannya dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, keadaan politik sekitar dan tempat dimana tafsir tersebut ditulis.¹⁷

Sumber yang memberikan warna dan pengaruh pada tafsir *Minnatur Rahman* karya Abu Marwan Yahya yakni penafsiran para ulama-ulama terdahulu, tafsir *Minnatur Rahman* banyak merujuk kepada kitab tafsir *Al-Qur'anil 'Azhiim* yang ditahzib oleh beberapa ulama dengan nama *Al Misbahul Munir fii Tahdzib Tafsir Ibni Katsir* karya al Hafizh Ibnu Katsir, lalu ada tafsir *Taisirul Kariimir Rahmaan fii Tafsir Kalaamil Mannaan* karya Syaikh Abdurahman bin Nashir as-Sa'diy yang merupakan ahli fiqh dan guru dari Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin, serta merujuk kepada tafsir dua imam besar Jalal yakni Jalaluddin As- Suyuthi dan Jalaluddin Al Mahalliy tidak cukup dengan tafsir Jalaalain Abu Marwan juga banyak merujuk kepada kitab *Anwaarul Hilaalain fit Ta'aqqubaat 'alal Jalaalain* karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman al Khumais. Untuk penjelasan *asbabunnuzul*-nya merujuk kepada kitab *Ash Shahihul Musnad Min asbabin Nuzul* karya *Al-Muhaddits* Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i.¹⁸

¹⁶ Siti Mursida, "Interpretasi Moh. E Hasim Dalam Tafsir Ayat Suci Lenyeupaneun Terhadap Fenomena Taklid," Jurnal: *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 36–53, hal. 37

¹⁷ Muna Arianal Afrida, "Methodology of Interpretation of Abu Marwan Bin Musa in the Book of Hidāyatul Insān Bi Tafsīr Al-Qur'ān," Jurnal: *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 203–26, hal. 203

¹⁸ Hadidi Marwan Yahya Abu, *Pengantar Kitab ' Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur ' an Takmilan Likitab Hidayatil Insan Bitafsiril Qur ' an ' (Pengantar Tafsir Al Qur ' an Minnatur Rahman)*, hal. 4-5

Tafsir *Minnatur Rahman fii Tafsiril Qur'an* menggunakan metode penafsiran tafsir *bil Ma'tsur* dapat terlihat dari banyaknya penafsiran yang mengambil sumber Al-Qur'an dan Hadis. Abu Yahya Marwan Hadidi bin Musa menggabungkan antara metodologi *Tahlili* dan *Ijmali* dalam menafsirkan tafsirnya karena dalam penjelasan yang membutuhkan pembahasan terperinci beliau menggunakan metode *Tahlili*, dan menggunakan metode *Ijmali* jika tidak membutuhkan pembahasan yang panjang. Dalam tafsir *Minnatur Rahman mufassir* menggunakan bahasa yang sangat ringan sehingga amat mudah untuk dipahami dan *mufassir* juga mencantumkan judul pada ayat-ayat yang akan dibahas tersebut sehingga sangat mudah dimengerti setiap konteks pembahasan dari ayat yang akan di tafsirkannya.¹⁹

Sebagai panduan moral kepada pemimpin politik, penelitian ini dapat meminimalisir konflik kepentingan dan memastikan bahwa tindakan politik dilakukan dalam kesadaran moral dan tanggung jawab yang tinggi. Etika politik dapat membantu untuk menjauhkan dari praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi, nepotisme dan mendorong merek pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Karena etika politik yang ideal adalah memperjuangkan kebaikan untuk kehidupan bersama.²⁰

Penelitian etika politik sangat penting untuk membantu mempromosikan integritas dan keadilan dalam pengambilan keputusan politik. Proses pengambilan keputusan politik yang kompleks ini seringkali memunculkan tantangan moral yang memerlukan pertimbangan mendalam. Para pemimpin politik harus mampu menghadapi tekanan dari fraksi yang menginginkan keputusan yang menguntungkan mereka secara pribadi atau partai mereka, namun harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menjadi tantangan untuk tetap menjaga integritas dan penerapan etika politik yang ideal.²¹

¹⁹ Acep Ihsan Rohmatulloh, "Terminologi Kebahagiaan Dalam Tafsir Hidayatul Insan Karya Marwan Bin Musa (Studi Deskriptif Analitis Atas Kata Fauz, Said Dan Falah)" (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hal. 10

²⁰ Thomas Hidy Tjaya Budiman Hardiman, Roebtrus Robert A, A. Setyo Wibowo, *Empat Esai Etika Politik*, I (Jakarta Pusat: www.srimulyani.net, 2011), hal. 13

²¹ Lia Muliawaty, Ajam Mustajam, and Mas Adi Komar, "Integritas Dan Pengambilan Keputusan Etis Dalam Sektor Publik: Studi Kasus Dan Pelajaran Dari Pemerintahan Daerah Di Indonesia," Jurnal: *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 1 (2024): 33–39, hal. 33-34

Sebagai contoh yang terjadi dipemerintahan Negara Indonesia pada peristiwa sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omibus Law Cipta Kerja kejadian tersebut mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani yang mematikan microphone anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Bapak Benny K Herman saat memberikan interupsi keberatan mengenai UU Cipta Kerja tersebut, kejadian serupa pada tanggal 8 November 2021 tentang rapat paripurna persetujuan Jendral (TNI) Andika Perkasa sebagai panglima TNI, ketika anggota DPR Fraksi Partai PKS Fahmi Alaydroes meminta waktu untuk interupsi tetapi Puan Maharani justru mengetuk palu sebagai tanda berakhirnya rapat paripurna tersebut.²²

Dari peristiwa tersebut dapat dilihat jelas sikap pemimpin DPR RI yang tidak menganggap penting musyawarah sehingga memberikan dampak pada kebijakan yang diciptakan dan eksistensi lembaga tersebut yang dipertaruhkan. Fenomena ini sudah jelas berbeda dari konsep musyawarah yang diajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Pada surat Al-Imran ayat 159 dijelaskan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ (أل عمران/3: 159)

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Al-Imran 3:159)

Menurut Abu Yahya Marwan Hadidi bin Musa dalam tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an* pada surat Al-Imran ayat 159 menjelaskan tentang mengharuskan manusia untuk bermusyawarah dalam urusan yang penting yang

²² Priyanto Dedik, “Jejak Puan ‘Hattrick’ Matikan Mikrofon Saat Rapat, PKS Dan Demokrat Kecele Gagal Interupsi,” *Kompas.Com*, 2022, <https://www.kompas.tv/nasional/292327/jejak-puan-hattrick-matikan-mikrofon-saat-rapat-pks-dan-demokrat-kecele-gagal-interupsi>.

membutuhkan pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam, seperti urusan politik, ekonomi, peperangan serta urusan kemasyarakatan lainnya.

Pada tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an*, Abu Yahya menjelaskan prinsip musyawarah ada 6 (enam) yaitu: Pertama, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, Mendapatkan keputusan yang bijak dan benar. Ketiga, menyatukan visi misi. Keempat, menerangi akal-pikiran. Kelima, mencerdaskan. Keenam, sikap menghargai atau toleransi.²³

Abu Yahya meyakini setiap keputusan yang diputuskan hasil dari musyawarah adalah keputusan yang terbaik dan benar, karena dari musyawarah tersebut telah menciptakan persatuan visi dan misi. Jika masih ada yang belum memahami akan pembahasan yang akan diputuskan, musyawarah sebagai sarana mencerdaskan dan memberi pemahaman kepada orang yang melaksanakan musyawarah tersebut. Di dalam musyawarah terdapat sikap saling menghargai pendapat orang lain, sehingga tidak menyakiti hatinya. Dan membuat mereka menjadi senang karena telah didengarkan.

Penulis sangat tertarik karena Abu Yahya mengaitkan ayat ini dengan kepemimpinan umat dalam urusan yang besar, seperti politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Dalam tafsirnya, musyawarah merupakan syarat mutlak untuk menciptakan kebijakan yang adil dan diterima semua pihak. Dalam konteks pengaplikasiannya musyawarah yang di gagaskan Tafsir Minnatur Rahman pada surah Al-Imran ayat 159 ini untuk lebih menekankan pada kepemimpinan politik dengan menjadikan musyawarah sebagai elemen penting dalam membangun masyarakat yang Islami. Sehingga terlihat jelas bahwa tafsir ini memiliki orientasi politik dan kemasyarakatan yang lebih eksplisit.

Dari permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi, inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan produk tafsir yang memiliki pandangan politis demi terbukanya pengetahuan tentang etika politik yang harus di terapkan di kehidupan bermasyarakat. Pada penelitian ini akan membahas etika

²³ Hadidi Marwan Yahya Abu, *Tafsir Al Qur ' an Minnatur Rahman (Pelengkap Tafsir Hidayatul Insan) Jilid 1*, hal. 738

politik menurut *Abu Yahya Marwan bin Musa Dalam Tafsir Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an*.

Hal inilah yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam, faktual dan representatif mengenai pemikiran terhadap bidang politik khususnya pada etika politik term keadilan, amanah dan musyawarah yang bersumber pada tafsir *Minnatur Rahman fii Tafsiril Qur'an* karya *Abu Yahya Marwan bin Musa* penulis tertarik untuk mengangkat dari topik permasalahan tersebut untuk dijadikan satu pembahasan khusus dengan judul: ***Etika Politik Menurut Abu Yahya Marwan bin Musa dalam Tafsir Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an***

B. Rumusan Masalah

Jika ditinjau dari latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan dijawab dari skripsi penelitian yang ditulis ini ialah:

1. Bagaimana penafsiran Abu Yahya Marwan bin Musa tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan etika politik term Amanah, Adil dan Musyawarah pada Tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an*?
2. Bagaimana Relevansi Penafsiran Abu Yahya Marwan bin Musa Dalam Tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an* dengan Keadaan Politik di Indonesia?

Penulis mengambil pertanyaan tersebut karena ini masalah sosial yang amat krusial dalam kehidupan bermasyarakat pada lingkungan sosial, dengan jawaban persoalan berikut diharapkan pertanyaan tentang bagaimana penafsiran Al-Qur'an Abu Yahya Marwan bin Musa perihal etika politik dalam Tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an* terjawab serta dapat dipahami dengan baik dan tentunya dapat dijadikan bahan referensi untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat sosial.

C. Tujuan Penelitian

Tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah disusun, selanjutnya penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana penafsiran Abu Yahya Marwan bin Musa yang biasa dikenal dengan Marwan bin Musa. pada ayat-ayat etika politik di tafsirnya yang berjudul *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an*.

2. Mengetahui Bagaimana Relevansi Penafsiran Abu Yahya Marwan bin Musa Dalam Tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an* dengan Politik di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan yang akan ditempuh, tentunya penelitian ini pun memiliki manfaat kegunaan yaitu kegunaannya adalah :

Jika ditinjau secara teoritis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah wawasan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk menerapkan kesadaran akan pentingnya etika politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk memahami etika politik yang telah ada dalam Al-Qur'an yang akan dibahas dalam tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an* karangan Abu Yahya Marwan bin Musa.

Adapun secara praktis penelitian ini berguna untuk menyampaikan informasi perihal anjuran politik yang tertera dalam Al-Qur'an pada tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an* karya Marwan Bin Musa tentang pentingnya kesadaran aktif dan memahami etika politik yang terkandung dalam Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai literatur-literatur tentang ayat Al-Qur'an yang membahas perihal macam-macam etika politik yang harus dimiliki dan diterapkan oleh umat Islam, telah menemukan serta mengkaji beberapa buku, tesis, skripsi, jurnal dan artikel yang berhubungan pada penelitian ini.

Terdapat tesis karya Aidil Azharie Handayani dengan judul "Konsep Pemikiran Politik Kekuasaan dalam Perspektif Al-Qur'an". Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ketidaktertatan prinsip politik di dalam Al-Qur'an tetapi prinsip-prinsip tersebut masih ditemukan di dalam Al-Qur'an pada surat (Q.S Al-Maidah: 51) penjelasan tentang pemimpin harus sosok yang beriman, lalu pada surat (Q.S An-Nisa: 59) penjelasan tentang perintah patuh kepada pemimpin, lalu ada surat (Q.S An-Nisa: 58:59) tentang penjelasan karakteristik seorang pemimpin,

dan ada pada surat (Q.S Al-Syuara: 38) penjelasan tentang perintah beresyawarah dalam memutuskan suatu hal yang bersifat kepentingan bersama.²⁴

Distingsi penelitian dengan penelitian penulis adalah memiliki perbedaan titik fokus terhadap term pembahasan serta tidak menggunakan tafsir khusus yang lebih spesifik dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan. Memiliki persamaan pada metodologi penelitian yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif analisis.

Terdapat skripsi karya Muh Adnan dengan judul “Etika Politik Dalam Al-Qur’an” Penelitian tersebut menjelaskan amanah dan keadilan harus menjadi pegangan teguh umat Islam dalam bermasyarakat dan memimpin karena kedua prinsip ini mampu mewujudkan sistem pemerintahan ideal sesuai dengan Surah An-Nisa ayat 58. Prinsip etika politik menurut Islam yaitu, menjaga amanah sebagai perilaku jujur untuk menjalankan tugas. Berlaku adil agar terciptanya kesetaraan antar semua pihak di hadapan hukum. Penelitian ini mengajarkan untuk setiap orang yang masuk ke dalam dunia politik hendaknya harus lebih menguatkan prinsip-prinsip etika politiknya karena menyangkut baik dan buruk dari setiap tindakan, terkhusus pada aspek memegang amanah serta memberi keputusan dengan adil seperti yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 untuk kemaslahatan bersama.²⁵

Distingsi penelitian dengan penelitian penulis adalah memiliki perbedaan pada analisis yang menggunakan metode uraian dengan metode tafsir tahlil, mulai dari kosa kata (semantik), hubungan antar ayat (munasabah), sebab turun (asbabun nuzul), kandungan ayat dan hukum yang dihasilkan oleh ayat. Memiliki persamaan pada term yang diambil yakni term keadilan dan amanah.

Terdapat skripsi karya Uvit Fitriatul Qodrat dengan judul “ Penafsiran Ayat-Ayat Sosial Politik Perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an” penelitian ini membahas dua aspek, yaitu aspek sosial dan politik. Menurut Sayyid Qutb ialah implementasi dari pertalian saudara yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang menjelaskan setiap muslim diutamakan menumbuhkan rasa

²⁴ Handayani Azharie Aidil, “Konsep Pemikiran Politik Kekuasaan Dalam Perspektif Al-Qur’an” (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

²⁵ Adnan Muh, “Etika Politik Dalam Al-Qur’an” (Skripsi: STAIN Majene, 2022).

cinta kasih sayang, perdamaian, kerjasama dan persatuan. Untuk ayat-ayat politik Sayyid Qutb menjadikan manusia berada di bawah kekuasaan pemimpin yang berlandaskan syariat Islam, jika pemimpinnya zalim maka harus diperangi untuk mengingatkan pemimpin yang zalim ke jalan yang benar.²⁶

Distingsi penelitian dengan penelitian penulis memiliki perbedaan data primer penelitian karena menggunakan tafsir *Fi Zhilail Qur'an* Serta pada pembahasan yang membahas tentang aspek-aspek sosial seperti masyarakat, kebudayaan, proses sosial, interaksi sosial dan pranata sosial. Memiliki persamaan pada metode penelitian yakni kualitatif deskriptif dengan metode analisis *content analysis*.

Terdapat jurnal karya Dwi Fa'yi Arya Sakhi, Putri Apriliyana Idi Amin dan Kurniati dengan judul “Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi” penelitian ini membahas tentang penekanan Al-Mawardi dalam menegakkan keadilan, tanggung jawab moral dan efisiensi dalam pemerintahan oleh seorang pemimpin. Keadilan untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, Al-Mawardi menjelaskan pentingnya integritas kejujuran dan ketakwaan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan Al-Mawardi menjelaskan untuk melaksanakan *syura* (musyawarah) dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut Al-Mawardi etika politik Islam memiliki konsep yang dapat diimplementasikan untuk masyarakat kontemporer melalui prinsip keadilan, tanggung jawab, musyawarah, hak asasi manusia dan pemberdayaan ekonomi sosial menghadapi tantangan zaman kini serta membangun sebuah pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.²⁷

Distingsi penelitian dengan penelitian penulis adalah memiliki perbedaan pada objek yang dikaji penelitian ini mengkaji pemikiran filsuf Al-Mawardi tentang pemikirannya yang tertulis dalam buku *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*” mengenai etika politik. Memiliki persamaan pada metode penelitian Pada yakni sama-sama

²⁶ Qodrat Fitriatul Uvit, “Penafsiran Ayat-Ayat Sosial Politik Perspektif Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an” (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

²⁷ Sakhi Arya Fa'yi Dwi, Amin Idi Arpilyana Putri, and Kurniati, “Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi,” *Jurnal: Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi, Dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 95–106.

menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis.

Terdapat jurnal karya Khoirun Nisya, Nur Aulia Nasrung dan Kurniati yang berjudul “Esensi Penguatan Etika Politik Islam di Indonesia” penelitian ini membahas tentang upaya penerapan etika politik Islam di Indonesia yang jumlah penduduknya mayoritas 87% beragama Islam. Penerapan nilai-nilai moral Islam dalam praktik politik menjadikan agama sebagai esensi dasar dalam berpolitik. Pentingnya penguatan politik Islam karena di dalamnya mengandung banyak prinsip-prinsip moralitas dan keadilan yang harus senantiasa di tegakkan peran masyarakat, tokoh politik serta pengawasan hukum sangat dibutuhkan untuk berbagai lembaga ke pemerintahan di Indonesia dengan segala kebijakan yang telah dibuat. Dampak dari penerapan penguatan etika politik Islam akan menjadikan lingkungan politik yang lebih berintegritas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, tokoh dan pemimpin politik.²⁸

Distingsi penelitian dengan penelitian penulis adalah memiliki perbedaan pada bagian fokus pembahasan yang memiliki fokus terhadap peran lembaga, peran tokoh dan peran masyarakat dalam penerapan politik Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang prinsip-prinsip dalam berpolitik Islam. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dari metode penelitian sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan studi pustaka.

Terdapat jurnal karya Nurul Hikmah Ramadhani Iskandar, Muh. Fajrin Kadri, Mohammad Sahrial Ramadhan dan Kurniati yang berjudul “Etika Politik Dalam Islam dan Langkah Pencegahan Pelanggaran Etika” penelitian ini membahas tentang prinsip etika politik tercermin dalam nilai-nilai sikap yang dicontohkan Rasulullah yakni jujur (*siddiq*), amanah, cerdas (*fathonah*), berkomunikasi yang baik (*tabligh*) prinsip-prinsip ini agar terciptanya integritas dan efektivitas dalam kepemimpinan politik. Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran etika oleh pemimpin penelitian ini menjelaskan untuk melaksanakan

²⁸ Khoirun Nisya, Nur Aulia Nasrung, and Kurniati, “Esensi Penguatan Etika Politik Islam Di Indonesia,” Jurnal: *Madani: Jurnal Ilmiah Multidipline* 2, no. 7 (2024): 248–55.

pelatihan dan pendidikan kepemimpinan dalam Islam, pembentukan kode etik aturan yang tegas tentang perbuatan yang benar dan perbuatan yang tidak benar untuk profesional dan kontrol sosial serta transparansi kontrol sosial yakni melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diciptakan menegakkan transparansi merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan dalam kepemimpinan dalam Islam.²⁹

Distingsi penelitian dengan penelitian penulis adalah memiliki perbedaan pada inti pembahasan pada penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang upaya pencegahan untuk tidak terjadinya pelanggaran nilai-nilai etika dalam berpolitik di masyarakat, dalam aspek persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Lalu ada buku dengan judul *Khazanah Profetika Politik* karangan Dr. M. Siddi Ritaudin, M.Ag. buku yang mengandung sedikit urgensi kritik pemerintahan namun tetap tidak keluar dari pembahasan pokoknya yakni kajian etika politik, dikursus kritik dalam Islam serta pemikiran politik Islam, ia menjelaskan bahwa kritik bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.³⁰

Distingsi penelitian dengan buku ini adalah memiliki perbedaan pada inti pembahasan, pada buku ini lebih cenderung membahas tentang kritik pemerintah dengan kajian etika politik dan persamaan terdapat pada konsep politik Islam yang disajikan di dalam buku tersebut.

Lalu ada pula buku dengan judul *Politik Islam* karangan dari Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag. Buku yang berisikan mengenai Azaz, pemikiran, serta pelaksanaan pada masa sejarah politik umat Islam ini diterbitkan pada Mei 2017 oleh Perdana Publishing. Di dalam buku ini memuat berbagai pelaksanaan penerapan politik Islam sejak awal masa dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW saat berada dikota Madinah, lalu pada kepemimpinan *Khulafaurrasyidin*, dan di lanjut dengan dinasti-dinasti Islam hingga mencapai kemunculan partai politik Islam di Indonesia.

²⁹ Iskandar Ramadhani Hikmah Nurul et al., “Etika Pemimpin Politik Dalam Islam Dan Langkah Pencegahan Pelanggaran Etika,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 230–36.

³⁰ Ritaudain, *Khazanah Propetika Politik*.

Walaupun pembahasannya secara ringkas namun cukup memberi pengetahuan dan tepat jika dijadikan referensi untuk karya tulis.

Distingsi penelitian dengan buku tersebut adalah memiliki persamaan dalam pembahasan pada lingkup politik Islam dan perbedaan terdapat pada pembahasan yang lebih umum pada buku sedangkan dalam penelitian pembahasan secara khusus pada term-term tertentu.

Dari berbagai hasil kajian pustaka di atas, tampaknya belum ada yang membahas tentang etika politik Menurut Al-Qur'an dalam Tafsir *Minnatur Rahman fii Tafsiril Qur'an* karya Abu Yahya Marwan bin Musa menggunakan kajian tematik tokoh sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.³¹

F. Kerangka Berfikir

Secara etimologis akar kata dari tafsir adalah *fassara-yufassiru-tafsiiran*, yakni artinya adalah keterangan dan penjelasan (*al-idhah wa at-tabyiin*), sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ (الفرقان/25: 33)

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.” (Q.S. Al- Furqan 25: 33)³²

Kata *fassara* adalah bentuk *muta'addi* dari kata kerja *fasara-yafsiru-fasran* atau *fasara-yafsuru-fasran* yang berarti *al-bayan* atau *kasyf al-mughata* (menyingkap sesuatu yang tertutup). Dengan demikian kata *tafsir* dapat diartikan *kasyfu al-murad 'an al-lafzh al-musykil* yang artinya menyingkap maksud dari kata yang sulit). Dalam bukunya Ma'mun Mu'min menjelaskan bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuthi berpendapat: Tafsir adalah ilmu yang memberikan penerangan atau penjelasan turunnya ayat-ayat (*nuzul*), *hal ikhwal*, sebab-sebab yang terjadinya *nuzul*, kisah-kisah, *tarikh Makki dan Madaniyah*, perintah serta larangan, *mutlaq muqoyad*, *khas*

³¹ H. Katimin, *Politik Islam : Studi Tentang Azas, Pemikiran Dan Praktik Dalam Politik Umat Islam*, I (Medan: Perdanan Publishing, 2017).

³² Ilyas Yuhonar, “Ulumul Quran (Yunahar Ilyas),” *Kuliah Ulumul Qur'an*, 2013. Hal. 259

dan am, nasikh dan mansukh, wa 'ad dan wa'idnya, muhkam dan mutasyabihnya serta halal dan haramnya, ungkapan *tamsil dan* lain sebagainya.³³

Secara Istilah menurut M. Qurasih Shihab tafsir Al-Qur'an ialah penjelasan tentang maksud dari firman-firman Allah SWT yang sesuai dengan kemampuan manusia, karena kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat sehingga apa yang diperoleh dari seorang mufasir juga bertingkat. Dapat disimpulkan bahwa tafsir ialah berbagai bentuk aktivitas dengan upaya menyingkap makna yang paling jelas serta tepat di antara makna yang telah dimuat oleh teks lafal ayat Al-Qur'an, sehingga memiliki fungsi sebagai penjelasan pesan dari Al-Qur'an.³⁴

Dapat difahami bahwa tafsir merupakan sebuah karya atau ilmu yang membahas tentang penjelasan makna lafaz-lafaz serta maksud dari ayat Al-Qur'an tafsir berusaha memberikan penjelasan segala sesuatu yang belum jelas maksudnya sehingga menjadi jelas atau dimengerti serta mampu menerangkan hal-hal yang masih bersifat samar di dalam Al-Qur'an agar mampu difahami lebih mudah.

Sampai saat ini diketahui ada empat macam metode mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an, metode ini cukup populer di kalangan akademisi yang memang memperhatikan kajian kitab tafsir, yakni metode Tahlili, Ijmali, Muqarran dan metode Maudhui. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode tafsir maudhui atau biasa dikenal dengan metode tematik.

Metode Tafsir Maudhu'i

Metode tematik memiliki tiga varian dalam penafsiran Al-Qur'an yang biasa dilakukan oleh para mufasir terdahulu.³⁵

pertama metode tematik berbasis kosa kata (*semantik*) langkah-langkahnya adalah menemukan kosakata yang akan diteliti, menemukan makna dasar dari kosakata yang diteliti, menemukan makna sinkronik-diakronik dari kosakata yang diteliti, lalu menemukan medan semantik dari kosakata yang diteliti, menemukan

³³ Mu'min Ma'mun, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hal. 25

³⁴ Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* (Salatiga: Tisara Grafika, 2020), hal. 2

³⁵ Solehudin, Yayan Mulyana, and Andi Nurlala, "Tiga Varian Metode Tematik (Maudhu'i) Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," no. 2 (2007): 146–67, hal. 12

makna rasional dari kosa-kata yang akan diteliti dan terakhir menemukan makna konseptual atau pandangan dunia Al-Qur'an dari kosa-kata yang diteliti.

Kedua, metode tematik dalam surat tertentu secara sederhana asumsi dasar dari metode ini adalah bahwa Al-Qur'an pada proses penurunannya dimediasi oleh malaikat Jibril as dari awal hingga selesai. Jibril memberikan petunjuk kepada Nabi dari atas setiap penurunan ayat-ayat secara parsial untuk meletakkannya pada surat tertentu dan ayat keberapa.

Ketiga, metode tematik Al-Qur'an *kullih*, metode ini ialah metode yang akan dipakai pada penelitian ini yakni dengan cara mengambil totalitas dari surat Al-Qur'an yang memuat tema-tema tersebut. Argumen yang dibangun dari varian ini adalah bahwa pesan-pesan Al-Qur'an disajikan oleh Al-Qur'an sendiri secara parsial. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema yang akan dibahas
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat dalam bingkai judul yang sudah dibuat
- 3) Mengurutkan ayat berdasarkan waktu turunnya; untuk kepentingan klasifikasi hukum dan sebagainya
- 4) Melakukan kajian kitab tafsir dengan menggunakan metode tahlili untuk mengkaji antara kata dalam satu kalimat antar kalimat dalam satu ayat serta antara ayat dalam satu rumpun
- 5) Membuat poin penting sebagai kandungan Al-Qur'an pada tema tersebut
- 6) Membuat ringkasan dengan rujukan tafsir ijmal; secara singkat kemukakan hadis-hadis Nabi serta pendapat para sahabat.
- 7) Hendaknya mufasir menggunakan penelitian ilmiah dalam penulisannya
- 8) Penulisan tafsir ini hendaknya diorientasikan kepada, menampilkan kebenaran Al-Qur'an dengan penjelasan yang bersifat komprehensif dan menampilkan kebenaran Al-Qur'an disajikan dengan bahasa yang menarik dan tidak terjebak dengan redaksi yang rumit serta gaya sastra.

Metode tafsir *maudhu'i* atau biasa disebut dengan metode tematik yakni metode yang ditempuh seorang mufasir melalui cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki tentang suatu masalah atau tema serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan walaupun ayat-ayat itu berbeda cara turunnya (*asbabun*

nuzul)³⁶ tersebar pada berbagai surat di dalam Al-Qur'an serta berbeda pula waktu dan tempat turunnya.³⁷

Metode tematik ini adalah metode yang cukup baru dibandingkan dengan metode lainnya, meski pun tergolong dengan metode yang baru tetapi banyak karya yang ditulis oleh pakar-pakar ternama dengan metode ini. Metode *maudhu'i* mempunyai spesifikasi yang tidak dimiliki oleh metode tafsir yang lainnya, jika diamati secara jelas urgensi dan juga prosedur metode *maudhu'i* dapat dikatakan bahwa metode ini yang terbaik untuk menafsirkan Al-Qur'an. Hafizh Ibn Katsir di dalam tafsirnya berkata "Jika ada orang yang bertanya, manakah metode yang paling baik untuk menafsirkan Al-Qur'an? Jawabannya adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri sebab kandungan Imam As-Suyuthi, di dalam bahasan pada buku *Ma'rifat Syuruth al-Mufasir wa Adabih* menceritakan bahwa para ulama berkata "barang siapa yang hendak menafsirkan Al-Qur'an, maka carilah terlebih dahulu penafsirannya di dalam Al-Qur'an sendiri, sebab kandungan yang global pada suatu tempat akan diperinci pada tempat yang lain". Oleh karena itu banyak para peneliti yang tertarik menulis tafsir *maudhu'i*.³⁸

Metode ini yakni memfokuskan kepada pandangan hanya pada satu tema pembahasan tertentu, dengan cara mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema yang akan dibahas tersebut dengan menghimpun semua ayat mempunyai topik pembahasan yang sama, menganalisis serta memahaminya ayat demi ayat lalu menghimpunnya ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, mutlaq dengan muqayad serta lainnya dan menambahkan dengan hadis-hadis yang bersangkutan agar dapat disimpulkan satu tulisan yang memiliki pandangan menyeluruh menyangkut tema yang dibahas tersebut.³⁹

³⁶ Secara Etimologis *Asbabun-Nuzul* terdiri dari dua kata: *asbab* dan *nuzul*. *Asbab* adalah bentuk plural dari kata *sabab* yang berarti menyebabkan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain sedangkan kata *nuzul* artinya jatuh dari sesuatu tempat yang tinggi. Secara Terminologis yaitu adanya suatu peristiwa, perkataan, atau perbuatan yang terjadi pada masa tertentu yang melatarbelakangi dan menjadi penyebab turun ayat-ayat Al-Qur'an (Hanafi: 2017)

³⁷ Anhar Ansyory, *Pengantar Ulumul Quran* (Yogyakarta: Lembaga Pengebangan Study Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2012), hal. 99

³⁸ Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Cet. I, hal. 112

³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hal. 385

Berdasarkan dengan metode yang diambil secara detail teori ini terdiri atas tiga langkah yang akan dilakukan, langkah awal yaitu melalui pendekatan historis untuk menemukan konteks sosio-budaya politik pada riwayat tokoh, lalu dilanjut membedakan antara ketetapan legal serta sasaran penafsiran tokoh, terakhir memahami dan menetapkan sasaran dari penafsiran tokoh dengan cara memperhatikan secara penuh latar belakang sikologisnya.⁴⁰

Secara etimologi, istilah "politik" berakar dari bahasa Yunani kuno. Kata ini berasal dari "polis," yang merujuk pada kota atau negara, dan berkembang menjadi "politis," yang berarti warga negara. Dari kata "politik memiliki beberapa pengertian: *Pertama*, pengetahuan ketatanegaraan yang melingkupi sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. *Kedua*, apapun yang menyangkut dan berhubungan dengan pemerintah negara ataupun negara lain seperti kebijakan, siasat dan hubungan kerjasama. *Ketiga*, Sikap perlakuan dalam menghadapi masalah dan menanganinya.⁴¹

Politik dapat didefinisikan sebagai: *Pertama*, politik merupakan usaha untuk membahas dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik merupakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, Politik merupakan kegiatan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. *Keempat*, politik merupakan kegiatan tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik adalah konflik untuk mencari dan mempertahankan apa saja yang dianggap penting. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari segala gejala dan aktivitas yang terkait perumusan dan perwujudan kebaikan bersama, lembaga politik seperti negara dan pemerintahan, kekuasaan, serta pengambilan kebijakan umum dan konflik.⁴²

Fokus dari penelitian ini, adalah penafsiran yang terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang etika politik pada kitab tafsir *Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an* karya Abu Marwan Hadidi bin Musa. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak term

⁴⁰ Fazlur Rahman and Sutrisno, *Kajian Terhadap Metode Epistemologi Dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 130

⁴¹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>.

⁴² Gatara Sahid, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*, IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 43

yang berkaitan dengan politik seperti, *Amanah*, *Asyura*, *Al-Mulk*, *Al-Imam*, *Al-Hukm*, *Khalifah*, *At-Tamkin* dan sebagainya tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas term adil, term amanah dan term musyawarah.

Untuk mengetahui jumlah ayat yang mengandung term adil, term amanah dan term musyawarah penulis menelusuri menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh Al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, untuk term adil penulis menemukan sebanyak 28 ayat dalam Al-Qur'an⁴³, untuk term amanah penulis menemukan sebanyak 6 ayat dalam Al-Qur'an⁴⁴ dan untuk term musyawarah penulis menemukan 4 ayat dalam Al-Qur'an.⁴⁵

Setelah melakukan studi dan analisis awal penulis mendapati bahwa tidak semua ayat tersebut memiliki konteks yang berkaitan dengan etika politik pada term adil memiliki 4 ayat yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8, Shaad ayat 26 dan Shaad ayat 26. Pada term *Amanah* memiliki 3 ayat yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 58, Al-Anfal ayat 27 dan Al-Ahzab ayat 72 dan pada term musyawarah memiliki 2 ayat yang terdapat pada surah Al-Imran ayat 159, Asy-Syura ayat 38,

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yaitu pendahuluan sebagai langkah awal dari kegelisahan akademik serta pentingnya penelitian ini, yakni dibab ini terdapat latar belakang, yang dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian selain itu perlu adanya pustaka untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian yang sudah diteliti terdahulu.

Bab II Landasan Teori, terlebih dahulu penyusun memberikan pengertian umum tentang etika politik, dan pada bab ini memberikan nilai-nilai etika politik yang ada pada Al-Qur'an dengan sumber dan pandangan para ilmuwan, ulama, serta tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang politik.

⁴³ Al-Baqi 'Abd Fu'ad Muhammad, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazi Al-Qur'a Al-Karim* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1996), hal. 448-449

⁴⁴ Al-Baqi 'Abd Fu'ad Muhammad, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazi Al-Qur'a Al-Karim* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1996), hal. 88-89

⁴⁵ Al-Baqi 'Abd Fu'ad Muhammad, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazi Al-Qur'a Al-Karim* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1996), hal. 391

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari: Pendekatan dan metode, penulis akan memaparkan tentang jenis dan sumber data penelitian serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, karakteristik penafisiran, merupakan hasil penelitian dan pembahasan Etika Politik dalam Tafsir Minnatur Rahman Fii Tafsiril Qur'an Karya Abu Marwan Hadidi bin Musa term adil, term amanah dan term musyawarah.

Bab V Penutup, bab ini adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran sebagai bentuk kritik dari kekurangan penelitian. Sebagai referensi penulis melampirkan daftar pustaka yang telah digunakan pada penelitian ini pada bagian akhir.

